

**Judul** : DPR Sahkan UU Pemilu  
**Tanggal** : Jumat, 21 Juli 2017  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 1 & 15

# DPR Sahkan UU Pemilu

**JAKARTA**—DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) melalui rapat paripurna yang berlangsung siang kemarin hingga dini hari tadi.

Pengambilan keputusan dilakukan secara aklamasi oleh anggota DPR dari enam fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nas-Dem, PKB, Hanura, dan PPP. Empat fraksi lain memilih *walkout* yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN.

Paripurna ini memutuskan memilih opsi Paket A yang selama ini didukung oleh pemerintahan beserta enam fraksi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang akan digunakan pada Pemilu 2019 adalah 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Isu *presidential threshold* ini merupakan yang paling alot selama pembahasan RUU Pemilu berlangsung.

Hal 15



## DPR Sahkan UU Pemilu

(( dari Hal 1

Adapun isi Paket A selengkapnyanya yang dimenangkan parpol pendukung Jokowi, yakni *presidential threshold*: 20-25%, *parliamentary threshold*: 4%, sistem pemilu: terbuka, jumlah kursi per dapil: 3-10, dan metode konversi suara: *sainte lague* murni.

Aksi *walkout* tadi malam juga dilakukan oleh pimpinan DPR, yakni Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Mereka mengikuti langkah fraksinya. Saat pengambilan keputusan, pimpinan DPR yang tersisa tinggal dua yakni Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Setya Novanto akhirnya mengambillah pimpinan sidang yang ditinggalkan Fadli Zon.

Novanto kemudian membacakan jumlah kehadiran anggota DPR yang hadir pada pengambilan keputusan, yakni 538 orang. Anggota yang mendukung opsi Paket A menurut dia ada 322, pendukung Paket B sebanyak 216. "Kita putuskan apakah opsi A secara aklamasi bisa disetujui?" ujar Novanto yang dijawab setuju oleh seluruh peserta sidang, ta setuju oleh peserta rapat.

Di luar parpol pendukung pemerintah, empat fraksi lain mendukung Paket B. Paket B terdiri atas *presidential threshold*: 0%, *parliamentary threshold*: 4%, sistem pemilu: terbuka, jumlah kursi dapil: 3-10, dan metode konversi suara: kuota hane.

Sebelum voting pengambilan keputusan, empat fraksi yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS berusaha agar voting tidak dilakukan tadi malam, tujuannya agar lobi-lobi dilanjutkan. Mereka menuntut voting ditunda hingga Senin (24/7).

Karena terdapat perbedaan pandangan, rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya memutuskan dilakukan voting untuk menentukan kapan waktu voting dilakukan.

Hasilnya, anggota DPR yang setuju voting dilakukan tadi malam sebanyak 322 orang, mereka berasal dari PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB. Sedangkan yang setuju voting ditunda ke Senin sebanyak 217, yakni berasal dari Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS.

Proses rapat paripurna sepanjang siang hingga tengah malam tadi berjalan alot. Rapat tak jarang diwarnai debat dan saling interupsi di antara anggota DPR.

Saat membuka kembali rapat paripurna setelah diskors untuk lobi pada pukul 22.00 tadi malam, Fadli Zon menyebut



Anggota DPR Fraksi PKS melakukan konsolidasi sesuai musyawarah dan lobi di sela-sela rapat sidang Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tadi malam (foto atas). Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy (dua kanan) menyerahkan laporan hasil kerja kepada pimpinan sidang Fadli Zon.

hasil lobi-lobi mengerucut pada dua paket isu krusial RUU Pemilu. Paket tersisa yakni A atau B.

Perbedaan pandangan fraksi, terutama pada isu *presidential threshold* sudah terlihat pada pemaparan fraksi pada paripurna siang harinya. Seluruh partai politik (parpol) pendukung pemerintah mendukung Paket A. Fraksi tersebut yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB.

Sedangkan tiga fraksi menegakkan mendukung Paket B. Fraksi tersebut yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. Sedangkan Fraksi PAN memilih opsi *presidential threshold* 10-15%.

Pimpinan DPR lalu menunda sidang pada pukul 14.00 dan memberi waktu kepada seluruh fraksi melakukan lobi selama dua jam. Namun, karena alotnya proses lobi yang berlangsung tertutup, rapat paripurna baru bisa dibuka kembali delapan jam kemudian, atau pada pukul 22.00.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dalam

pandangan fraksinya menolak berapa pun angka *presidential threshold* karena dapat mencederai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Partai Gerindra menginginkan agar musyawarah tetap mufakat. Bagi Gerindra, *threshold* 20%, atau *threshold* berapa pun tak sesuai. Kami tak ingin Pilpres 2019 akan dicerai dengan pelanggaran ins-konstitusional," ucap Muzani di ruang rapat paripurna, Gedung DPR.

Hal yang sama disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Sutriyono. PKS memandangi *presidential threshold* ketika ditadakan akan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya dipilih sebagai presiden.

Di samping itu, peniadaan *presidential threshold* memuat pemilu lebih berkeadilan dan membentuk kesetaraan karena setiap partai politik bisa mengajukan capres-cawapres sendiri. "Dengan demikian rakyat akan diuntungkan ba-

nyak calon alternatif pemimpin bangsa," papar Sutriyono.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo menegaskan bahwa RUU Pemilu memang seharusnya diselesaikan kemarin. Dia mengaku meng-hargai jika ada perbedaan pendapat oleh fraksi-fraksi. "Soal ada yang bersikukuh kita har-gai saja, itu sah-sah saja. Semo-ga malam ini selesai," ujar Tjah-jo sesuai skorsing sidang pari-purna kedua kalinya pada pu-kul 17.40 WIB tadi malam.

Dia kembali membantah *presidential threshold* 20% akan melahirkan calon presiden tunggal. Apalagi, angka *threshold* yang sama sudah diguna-kan dalam dua pilpres sebelu-mnya dan pesertanya selalu lebih dari satu pasangan.

Dengan disahkannya RUU Pemilu ini dipastikan akan ada gugatan ke Mahkamah Konsti-tusi. Pasal yang akan digugat antara lain *presidential threshold* karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.

● kiswondari/okezone